

**PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI
(Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Keilmuan Sosiologi

Disusun Oleh :

Mr. Muhammad Awa

NIM : 13720059

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mr. Muhammad Awaë
NIM : 13720059
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)** ini merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 24 Juni 2019



Mr. Muhammad Awaë

NIM : 13720059



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/Un.02/DSH/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. MUHAMMAD AWAE
Nomor Induk Mahasiswa : 13720059
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Penguji I

Achmad Uzair, S.IP., M.A. Ph.D.
NIP. 19780315 201101 1 002

Penguji II

Drs. Musa, M.Si
NIP. 19620912 199203 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

DEKAN



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Muhammad Awae

NIM : 13720059

Program Studi : Sosiologi

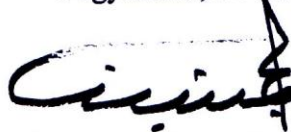
Judul : Peran *Civil Society* Dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi. Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2019



Dr. Achmad Zainal Arifin, M.Ag., M.A.

NIP: 19751118 200801 1 013.

MOTTO

**“SELAGI ORANG MELAYU PATANI MASIH TIDAK BISA
MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI
MAKA KEADILAN TIDAK AKAN TERWUJUD...”**

Chikmud Madman,

(Ayah kepada Tiga Anak Kecil yang Mati Terbunuh)

Beluka Perak, 3 Februari 2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini

Kepada :

Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang atas segala upaya pengorbanan dan doa yang tulus tiada henti untuk keberhasilanku. Terima kasih telah memberikan fasilitas dan dukungan untuk mencapai gelar sarjana ini.

Kepada abangku dan kakakku yang terus memberikan motivasi kepadaku untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi contoh dan panutan yang baik pula.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku dan semoga keinginan kita semua tercapai.

Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Kepada Tanah Air tercinta yang selalu mengingatkan saya dalam memperjuangkan dan memikulkan amanat penderitaan rakyat, semoga kelak nanti akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan yang hakiki.

Almamater Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

*DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA
PENYAYANG*

ALHAMDULILLAH segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang kurniakan limpah dan hidayahnya sehingga memberi kemudahan dalam segala hal termasuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan harapan semoga yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT sebagai bagian dari amal soleh. Lebih dari itu, harapan semoga kelak di hari akhirat, dibangkitkan bersama-sama orang soleh dan diberi kemudahan di Yaumul Hisab, juga atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada penelitian ini saya meneliti dengan judul **PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program strata satu di jurusan Sosiologi, fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kajian yang membahaskan peran *civil society* dalam proses perdamaian di Patani khususnya Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) yang memfokuskan kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia, membuka ruang politik, ruang demokrasi, dan menciptakan ruang keamanan sehingga mendorong masyarakat dapat berperan aktif dan partisipasi langsung dalam menentukan hasil kedamaian beserta sikap ekspresif yang sebenarnya terhadap situasi konflik di kawasan tersebut. Sebagai prinsip tertinggi Lempar yaitu kedamaian yang hakiki adalah kehendak rakyat Patani untuk menentukan masa depan nasib bangsanya.

Dengan hormat, dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang ikut membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Bahwa sadar akan terbatas dari penulis, maka sekaligus penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Drs. KH. Yudian Wahyudi, Pg.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, yang banyak memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi strata satu (S1).
3. Dr. Achmad Zainal Arifin, M.Ag., M.A., selaku Kepala Prodi Jurusan Sosiologi. Dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) serta pembimbing tugas akhir (skripsi) yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal perkuliahan sehingga saat akhir dalam penulisan skripsi ini.
4. Achmad Uzair Fauzan, S.IP., M.A, Ph.D. selaku Direktur *International Office* UIN Sunan Kalijaga. Dan sekaligus Dewan Penguji I yang telah membantu dan memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Musa, M.Si., selaku Dewan Penguji II yang telah membantu dan memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktu.
6. Semua dosen-dosen seluruh civitas akademika yang penulis menerima berbagai ilmu pengetahuan dari

konsentrasi Program Studi Sosiologi, fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dan juga seluruh lembaga-lembaga bidang yang berkaitan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Semua Staf Pengurus Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) karena sudah bersedia dan mengizinkan saya dalam penelitian ini.
8. Teman-teman sekelas Sosiologi dan sahabat-sahabat kuliah kerja nyata (KKN) Cokrodingratan, Kotamadya Yogyakarta.
9. Juftazani, selaku orang tua yang banyak memberikan nasehat kepada saya selama di RI.
10. Drs. H. R.MA Hanafi, Drs. H. Sidik Jatmika, dan Dr. H. Andy Dermawan, MA. selaku pembina dan penasihat organisasi mahasiswa Patani di Yogyakarta. Dan sekaligus sebagai motivator, contoh dan panutan yang baik pula.
11. Teman-teman keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI Yogyakarta) dan PMIPTI Se-Indonesia bahkan tidak lupa juga seluruh organisasi mahasiswa Patani di RI.
12. Teman-teman keluarga besar mahasiswa asing *International Students Association of Sunan Kalijaga* atau Perhimpunan Mahasiswa Internasional Sunan Kalijaga (PERMINSUKA).
13. Teman-teman keluarga besar mahasiswa Melayu Lembaga Ikatan Mahasiswa Melayu ASEAN (LIMMA) Yogyakarta.

14. Dr. Ahmad Suaedy, MA., Hum., selaku Direktur *Institute of Southeast Asian Islam (ISAI)*s UIN Sunan Kalijaga dan pegiat semuanya atas kesempatan dan kepercayaan untuk magang selama beberapa bulan. Senang bisa bersama penggiat ISAIs terutama peneliti muda Afrizal Qosim Sholeh, S.Sos dan Annisa Mayasari, S.Pd.
15. Saudara-saudara organisasi Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta (IPR-Y), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY), dan Persatuan Mahasiswa Malaysia (PMM UIN SUKA).
16. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencak Silat CEPEDI UIN Sunan Kalijaga, Sahabat-sahabat organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Rayon Humaniora Park), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM UIN SUKA), Keluarga Mahasiswa Pencinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta, dan Lembaga Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Demikian juga teman-temanku berbagai pihak yang tidak menyusun sebutkan satu persatu atas bantuan dan partisipasinya.

Besar harapan saya semoga apa yang sudah saya kerjakan ini, dapat menjadi manfaat bagi setiap kalangan, terutama untuk para akademisi maupun aktivis dan juga pemerintah khususnya dalam kajian tentang peran *civil society* dalam proses perdamaian konflik sosial. Saya percaya penelitian ini jauh belum seutuhnya bisa dikatakan sempurna, saya mengakui akan keterbatasan dan kemampuan peneliti

sendiri dalam melakukan penelitian ini. Maka, saya selalu menerima setiap masukan saran dan kritik terhadap isi dari naskah ini agar ke depannya dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Penulis,

DAFTAR SINGKATAN

ABRIP	: Angkatan Bersenjata Revolusi Islam Patani
ASA	: Asia Students Association
ASEAN	: The Association of Southeast Asia Nations
BIPP	: Barisan Islam Pembebasan Patani
Bandes	: Bantuan Desa
BRN	: Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani
BUMI	: Pusat Budaya Melayu Patani
Bungaraya Group	: Bungaraya Group for Education Foundation
CEPEDI	: Cepat Pembela Diri
CSOs	: Civil Society Organization
DK-PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DM	: Darurat Militer
DOM	: Daerah Operasi Militer
EU	: European Union
FTU	: Fatoni University
FISHUM	: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Forbes	: Forum Bersama
Forjadom	: Forum Janda Korban DOM
GAMPAR	: Gabungan Melayu Patani Raya
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GMIP	: Gerakan Mujahidin Islam Patani
GOM	: Gerakan Operasi Militer
GPP	: Gerakan Separatis Patani
GUP	: Gerakan Ulama Patani
GTM	: Gerakan Tutup Mulut
HAF	: Hilal Ahmar Foundation
HAM	: Hak Asasi Manusia

HAP	: Jaringan Hak Asasi Perikemanusiaan Patani
HIMPASAY	: Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ICG	: International Crisis Group
IMCS	: International Movement of Catholic Students
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
INSANI	: Patani Institute for Research and Human Development
INSouth	: Intellectual of Patani
IPR-Y	: Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta
ISAI	: Institute of Southeast Asian Islam
JALEM	: Jaringan Belia Lembangan Sungai Teluban
JASAD	: Jaringan Mangsa Undang-Undang Darurat
JAMIN	: Jaringan Mangsa Kasus Keamanan Pattani
JARUM	: Jaringan Guru Sekolah Melayu
JOP	: Justice for Peace
KAA	: Konferensi Asia-Afrika
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KMPD	: Keluarga Mahasiswa Pencinta Demokrasi
KUMPAS	: Kursus Musim Panas
LEMPAR	: Lembaga Patani Raya Untuk Kedamain dan Pembangunan
LDI	: Local Development Institute

LIMMA	: Lembaga Ikatan Mahasiswa Melayu ASEAN
LSM	: Lembaga Swadya Masyarakat
MAC	: Muslim Attorney Centre
MAIP	: Majelis Agama Islam Patani
MARA Patani	: Majelis Syura Patani
NCWP	: The Network of Civic Women for Peace
NGOs	: Non Government Organization
NSC	: National Security Council
NUSANTRARA	: Nusantara Foundation for Human Right and Development
OPD	: Organisasi Pagar Desa
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
ORMAWA	: Organisasi Mahasiswa
Otsus	: Otonomi Khusus
Parpol	: Partai Politik
PAS	: Partai Islam Se-Malaysia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERKASA	: Yayasan Pusat Penyelarasan Tadika Selatan Thailand
PERKHAF	: Persatuan Seni Khat Anak Fathoni
PerMAS	: Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani
PERMATAMAS	: Persekutuan Rakyat Mempertahankan Hak Masyarakat dan Sumber Daya Alam untuk Perdamaian
PERMINSUKA	: Perhimpunan Mahasiswa Internasional UIN Sunan Kalijaga

PerSHaP	: Persatuan Silat Harimau Patani
PERWANI	: Persatuan Perempuan Patani
PETA	: Pembela Tanah Air
PGA	: Pendidikan Guru Agama
PICSEB	: Persatuan Intelek Cinta Seni Budaya
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara
PM	: Perdana Menteri
PMIPTI	: Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMM UIN SUKA	: Persatuan Mahasiswa Malaysia UIN Sunan Kalijaga
PNU	: Princes of Naradhiwas University
PNYS	: Pattani, Yala, Narathiwat, Setun
PPP	: Persatuan Pemuda Patani
PSC	: Patani Student Center
PSU	: Prince of Songkhla University
PULO	: Patani United Liberation Organization
PUSTAKA	: Pusat Sekolah Taman Didikan Kanak-Kanak
RKK	: Runda Kumpulan Kecil
RSD	: Righth to Self Determination
SCG	: Siam Cement Group Foundation
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SFT	: Student Federation of Thailand
SPAN	: Southern Paralegal Advocacy Network
STAIM	: Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada
UAD	: Universitas Ahmad Dahlan

UCY	: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
UII	: Universitas Islam Indonesia
UN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
UMY	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UNDP	: United Nations Development Program
UNU	: Universitas Nahdatul Ulama
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UNRIYO	: Universitas Respati Yogyakarta
YAKIST	: Yayasan Kebudayaan Islam Selatan Thailand
YICE	: Youth Integration for Community Empowerment Center
YMAT	: Young Muslim Association of Thailand
YRU	: Yala Rajabhat University
WARTANI	: Warta Patani
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II.....	35
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	35
A. Kemunculan Gerakan <i>Civil Society</i> Dalam Proses Perdamaian Patani	35

B. Profil Sejarah Berdiri Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan	42
1. Visi dan Misi “Lempar”	58
2. Tiga Strategi Utama “Lempar”	59
3. Struktur Pengurus “Lempar”	60
4. Kondisi “Lempar”	61
5. Program “Lempar”	63
BAB III	64
PERANAN LEMBAGA PATANI RAYA UNTUK KEDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN DALAM PROSES MEMBANGUN PERDAMAIAN DI PATANI.....	64
A. Advokasi Hak Asasi Manusia dan Agenda Satu Patani	71
B. <i>Peace Advocacy</i> dan Pengembangan Masyarakat	77
1. <i>Peace Dialogue Process</i> dan Bicara Patani	77
2. Program Jaringan Kampung Damai	85
BAB IV	102
ANALISIS PERANAN LEMBAGA PATANI RAYA UNTUK KEDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI.....	102
A. Advokasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi	102
B. Peranan Lempar Terhadap Proses Perdamaian	107
BAB V	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	114

DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122

ABSTRAK

Masyarakat Patani di Thailand Selatan berada dalam situasi konflik yang telah berlangsung dari satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (*peace dialogue process*) antara perwakilan Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* (NSC) Thailand dengan rakyat Patani yang dipimpin oleh Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan mereka memicu harapan melahirkan perdamaian tetapi sering beberapa kali namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena proses perdamaian konflik di Patani tidak hanya menjadi kepentingan politik oleh kedua aktor perang sahaja yang akan menentukan resolusi penyelesaian konflik melainkan proses perdamaian Patani harus berkerja sama dari berbagai aktor penting lainnya seperti harus melibatkan partisipasi baik *civil society organizations* (CSOs), akademisi, pemimpin agama, elit politik yang berada di pusat kekuasaan. Sementara yang terpenting bagi masyarakat publik dengan tersedia sebagai ruang mengusulkan resolusi penyelesaian menuju perdamaian. Proses perdamaian yang diberi ruang politik terbuka bagi orang dapat berekspresi pikiran dan menyampaikan kebutuhan mereka tanpa terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) dalam proses perdamaian di Patani, Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di Patani, Thailand Selatan, melalui program kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) membuka ruang politik dan memperluaskan jaringan diantara masyarakat-masyarakat terutamanya masyarakat yang jadi korban pelanggaran HAM agar mereka memiliki ruang dapat menentukan nasibnya sendiri dan menuntut hak keadilan, kebebasan dalam negara demokrasi sesuai standar dunia internasional yang menghormati hak kebebasan. Sedangkan peranan Lempar melalui program penguatan masyarakat yaitu mengorganisir rakyat untuk melahirkan pelopor-pelopor (*peacemaker*) dengan penuh kesadaran politik, kedewasaan politik, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma proses hukum, serta berani mengeluarkan suara di dalam hati untuk menentukan hasil kedamaian dengan sebenarnya.

Kata Kunci: *Peran, Civil Society, Lempar, Damai, Konflik, Patani*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak tahun 2004 merupakan cetusan manifesto politik pada era “Perang Revolusi Patani” dengan secara gerilya, menunjukkan bahwa kebangkitan kembali penentangan rakyat Patani terhadap pemerintahan pusat Thailand, yang mana pernah terjadi pada periode sebelum sebagai bentuk penentangan secara berkecil-kecilan sahaja. Akibat konflik yang berkepanjangan di area tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing mempunyai ideologi nasionalis tertentu yaitu nasionalisme Siam-Thailand dengan nasionalisme Melayu-Patani, melainkan juga memiliki akar yang dalam merupakan faktor berkaitan dengan manajemen struktur administrasi kekuasaan baik segi hukum maupun kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak sesuai dengan identitas dan cara hidup masyarakat setempat serta tidak mendorong untuk masyarakat berpartisipasi langsung dalam tingkat yang bisa membangun perasaan yang benar-benar sebagai pemilik pribumi dan kesetaraan. Selanjutnya, merupakan faktor berkaitan dengan historis dari akibat perampasan melalui Perjanjian Bangkok (*The Bangkok Treaty of 1909*) yang dilegitimasi oleh kedua kuasa kolonialis asing yakni Kerajaan Siam-Inggris (*Anglo-Siamse*) pada 10 Maret 1909.¹ Dengan mayoritas penduduk keturunan Melayu berbahasa Melayu dan beragama Islam.

¹ A. Malek, M. Zamberi. 1993. “*Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*”, (Kuala Lumpur: Hizbi Shah Alam), hal. 92.

Wilayah Patani merupakan kawasan paling miskin dan minim pembangunan di Negara Thailand.

Konflik Patani semakin membara apabila tragedi berdarah di Krisek (*Krue Se*) dan Tak Bai yang mengundang banyak persoalan kepada masyarakat dunia. Menurut Farid Mat Zain dalam kajiannya “Muslim Selatan Thai: Konflik dan Perjuangan” terhadap peristiwa berdarah itu, dia telah menyimpulkan tiga pendapat umum tentang peristiwa tersebut. Pertama, tragedi Krisek dan Tak Bai dilihat sebagai titik permulaan kepada kebangkitan baru warga Muslim Melayu Patani yang sebelum ini telah lama menyepikan diri. Kedua, peristiwa tersebut juga dilihat sebagai reaksi yang ditunjukkan bagi membantah dasar pemerintahan pusat Thailand dan ketiga, tidak kurang juga yang mengaitkan tragedi tersebut dengan siri keganasan yang ada hubungan dengan rangkaian keganasan dunia.²

Masalah konflik Patani yang terjadi dalam bentuk “perang asimetris” (*asymetric warfare*) antara pemerintahan pusat Thailand dengan faksi-faksi gerakan pembebasan, seperti kelompok yang paling dominan yaitu Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) dan Organisasi Pembebasan Patani Bersatu atau *Patani United Liberation Organization* (PULO). Adapun terdapat juga kelompok selain keduanya adalah Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP), Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP). Demikian merupakan kelompok ideologi nasionalisme Melayu-Patani yang menuntut

² Mohd Roslan Mohd Nur, “*Konflik Selatan Thailand: Peranan Malaysia Sebagai Negara Jiran*”, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Mei 2017, hal. 159.

kemerdekaan. Organisasi tersebut melakukan dengan aksi perang gerilya.³

Hingga pada tahun 2007 merupakan suatu peristiwa yang mencetak sejarah baru bagi warga Muslim Melayu Patani di tengah-tengah krisis konflik dan kekerasan yang berlangsung panas sejak dari tahun 2004. Sebagai salah satu peristiwa penting yang memiliki pengaruh menentukan nasib pada titik balik politik di Patani. Semangat perubahan ini sebagai awal kebangkitan pemuda dan masyarakat sipil yang dipelopori oleh kelompok pelajar dan mahasiswa sebagai *front* terdepan yang memimpin demonstrasi di Masjid Jamek Patani. Ketika itu berkumpul para intelektual, sarjanawan, dan pengamat keadaan konflik yang mengambil sikap inisiatif melaksanakan tugas tanggung jawab terhadap masyarakat demi menuntut keadilan dan upaya membatalkan undang-undang darurat militer di wilayah konflik tersebut. Sejumlah demonstran pada masa itu terkumpul sebanyak 10.000 orang, menghadiri dari segenap lapisan rakyat tujuan unjuk rasa dan memprotes terhadap pemerintahan pusat Thailand. Karena tindakan represif militer sebelumnya, merupakan tindakan masuk ke ruang-ruang sipil baik yang melalui aparat secara intoleran, reaksioner, dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum menuntaskan pada masa lalu.

Demonstrasi terbesar ini dianggap merupakan titik perubahan dalam perkembangannya terbuka ruang bagi rakyat partisipasi dalam berpolitik, sebagai keinginan menuntut hak

³ Gede Richard Pramudita. 2015. *Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan tahun 2004-2006*, Bachelor Thesis, University Udayana, hal 2.

kebebasan dan keadilan oleh rakyat untuk rakyat. Namun bukanlah hanya peranan sebagai menekankan pemerintahan pusat Thailand menuntut perubahan sikapnya saja tetapi seharusnya menjadi suara bagi rakyat yang belum mencerminkan kebenaran dengan sendiri, sehingga masyarakat publik tidak akan menjadi alat yang sah dalam mengintimidasi rakyat yang mendukung posisi negara yang menerima informasi tidak berdasarkan fakta. Sehingga sikap kritis para intelektual itu sering dituduh oleh aparat keamanan sebagai kelompok yang mengambil jarak dengan gerakan separatis.

Dari periode inilah *civil society* telah mulai sadar dengan diskriminasi yang berlarut-larut lama dampaknya banyak masyarakat publik yang menjadi sasaran korban utama dari konflik dan kekerasan. Demikian keberadaan *civil society* yang tumbuh menjamur di Patani tentu saja membawa dampak yang beragam bagi masyarakat dan pemerintah. Hingga banyak *civil society* yang muncul sebagai menerima dan menjadi sebagian dari menolong korban yang secara kerugian serius dari peristiwa kekerasan yang terus berkejolak dalam konflik bersenjata. Sebagian organisasi memiliki visi dan misi dalam membantu yang sesuainya seperti pemulihan baik dari segi keuangan, kondisi psikologis, sampai membantu secara hukum.⁴

Kendati demikian, dalam situasi dan kondisi konflik yang telah berlangsung dari satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (*peace dialogue process*) antara pemerintah

⁴ Tuwaedaniya Tuwaemaengae. “*Patani Merdeka di atas Jalan Raya*”, Pattani: Awan Book, 2013), hal. 5, (Bahasa Thailand).

pusat Thailand dengan faksi gerakan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia ketika Ustadz Hasan Taib⁵ berjabat tangan dengan Paradorn Pattanathabut selaku sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* (NSC) pada masa perdana menteri Yingluck Shinnawatra, yang memimpin tim negosiasi Thailand. Pertemuan mereka memicu harapan melahirkan perdamaian tetapi sering beberapa kali namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena kondisi pemerintahan pusat Thailand di Bangkok sedang melanda krisis politik internal sehingga muncul kudeta Thailand pada 2014 pemerintah diktator militer merampas kekuasaan kembali. Justrus dampak dari konflik dan kekerasan dengan operasi bersenjata semakin kuat sehingga belakangan ini dapat mengurangi dan menghindari sasaran mangsa terkorban bukan kelompok sesama angkatan bersenjata, akan tetapi rasa ketakutan bagi penduduk di zona konflik dan seluruh warganegara masih berharap untuk berhenti segala operasi kekerasan dan aktivitas bersenjata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus mengembalikan ke meja dialog untuk mendapatkan kontrak yang bersepakat sehingga terus mengembalikan hak-hak mereka dengan kesejahteraan bagi

⁵ Ustadz Hasan Taib atau Hasan Taib adalah ketua staf delegasi dan perwakilan BRN dalam proses dialog perdamaian dengan pemerintahan pusat Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2013. Proses dialog perdamaian ini merupakan kali pertama yang membuat masyarakat dunia mengetahui dan pemerintah Thailand menerima bahwa faksi gerakan pembebasan Patani benar-benar nyata ada sejak masa lalu.

warga setempat dengan membangun proses perdamaian yang hakiki.⁶

Namun, setahun kemudian proses dialog perdamaian di Patani memulai babak baru dengan organisasi payung yang dikenal dengan nama Majelis Amanat Rakyat Patani atau Majelis Syura Patani (MARA Patani). Organisasi tersebut terdiri dari beberapa faksi perjuangan diantaranya yaitu Organisasi Pembebasan Patani Bersatu atau *Patani United Liberation Organization* (PULO), Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP), Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP). Namun hingga saat ini arahnya juga belum jelas. Yang tampak hanya istilah “Multikultural” dan “Daerah Aman/*Safety Zone*” di tengah-tengah realita yang masih gejolak dalam konflik dan kekerasan bersenjata antara angkatan perang Thailand dengan faksi gerakan pembebasan yang paling dominan di Thailand Selatan yaitu BRN.

Karena proses perdamaian konflik di Patani tidak hanya menjadi kepentingan politik oleh kedua aktor perang sahaja yang akan menentukan resolusi penyelesaian konflik melainkan proses perdamaian Patani harus bekerja sama dari berbagai aktor penting lainnya seperti harus melibatkan partisipasi baik *civil society organizations* (CSOs), akademisi, pemimpin agama, dan elit politik yang berada di pusat kekuasaan. Sementara sesuatu yang terpenting bagi masyarakat publik dengan tersedia sebagai ruang mengusulkan resolusi penyelesaian menuju perdamaian. Proses perdamaian yang

⁶ Faisol Mamang. 2017. *Peran Civil Society Organization dalam Proses Perdamaian di Patani. Thesis Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 3.

diberi ruang politik terbuka bagi orang dapat berekspresi pikiran dan menyampaikan kebutuhan mereka tanpa terancam. Karena tujuan dari proses perdamaian adalah mencerminkan pada maksud untuk menjawab persoalan kebutuhan utama daripada masyarakat setempat. Dengan demikian proses perdamaian yang hakiki harus memegang prinsip tertinggi keutamaannya untuk kepentingan rakyat pada dasarnya yang berpijak pada nilai-nilai kebudayaan Patani (*Islam-Malays*) mampu mengiringi suatu perubahan sosial-politik.

Peran *civil society* juga harus mengambil jarak dan bergerak bersama masyarakat untuk membangun perdamaian Patani. Salah satunya adalah Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan disingkat panggilannya LEMPAR⁷ yang sedikit memiliki nama yang hampir sama dengan GAMPAR atau Gabungan Melayu Patani Raya yang dipelopori oleh Harimau Malaya,⁸ yang merupakan seorang putra bongsu Sultan Abdulkadir Kamaruddin Raja Patani terakhir tahun 1902. Dengan itu Lempar adalah sebuah organisasi masyarakat sipil *civil society organizations* (CSOs) atau *Non Government Organization* (NGOs) yang berkembang daripada kelompok aktivis mahasiswa yang berdomisili orang tempatan yang berkeinginan untuk membuka ruang politik, ruang demokrasi, dan ruang keamanan sehingga mendorong

⁷ Kata singkatan LEMPAR selanjutnya akan peneliti menggunakan huruf besar setiap mulai kata seperti "Lempar".

⁸ Harimau Malaya adalah gelaran yang diberikan kepada Tengku Mahmood Mahyiddeen hingga tahun 1954. Keperibadian beliau yang tangkas, pintar, berani, dan bersemangat membuatnya berjuang mempertahankan marwah ibu pertiwi yang terjajah, martabat bangsa, dan kesucian agama Islam yang tercemar.

suatu perubahan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat dalam proses membangun perdamaian di Patani.⁹

Demikian seperti tersebut di atas, setelah muncul penandatanganan negosiasi perdamaian pertama kali antara pemerintahan pusat Thailand dengan faksi gerakan BRN pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian para akademisi dan intelektual progresif yang merupakan kelompok aktivis generasi baru yang telah mendirikan jaringan CSOs atau NGOs tempatan dan menyelenggarakan “Bicara Patani” pertama kali pada 11 Maret 2013 mengangkat tema “28 Februari proses dialog perdamaian atau proses dialog berkompromi” sebagai forum untuk berdiskusi tukar pendapat mengenai isu proses dialog perdamaian baru-baru bahwa ia sesuai dengan proses perdamaian standar internasional atau tidak? Dan apakah ia akan membawa dampak menuju kepada bertambah ketentuan proses perdamaian atau bertambah ketentuan perang yang berlarut-larut lama itu. Bicara Patani pernah terselenggarakan beberapa kali di berbagai lokasi daerah kampung maupun kota bahkan di area univertitas sebagai forum yang membuka ruang terhadap pandangan rakyat menghadapi suasana perang gerilya ke arah kedamaian yang hakiki. Lempar merupakan salah satu kelompok *civil society* berada di barisan terdepan dan jaringan *civil society* sebagai penyokong.¹⁰

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam situasi konflik dan kekerasan yang muncul dari sebab perbedaan

⁹ Mengupas dari buku panduan *Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan* yang diambil pada tanggal 27 Januari 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Tuwaedaniya Tuwaemaengae, Direktur Umum Lempar pada tanggal 11 Februari 2019.

identitas, agama, antara minoritas dan mayoritas namun tidak mungkin konflik tersebut hanya bisa diselesaikan oleh aktor tertentu sahaja melainkan harus partisipasi masyarakat dari pangkalan bawah sebagai menentukan nasib mereka sendiri. Maka dari itu, peneliti dapat mengambil rumusan masalah yang akan diteliti pada **Peran *Civil Society* Dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Keadamaian dan Pembangunan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Lembaga Patani Raya Untuk Keadamaian dan Pembangunan?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran *Civil Society* Dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Keadamaian dan Pembangunan).

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil dan dapat memberikan manfaat serta memiliki kegunaan akademik sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dan memberikan sumbangsih khasanah pengetahuan bagi pembaca, dan memberikan kontribusi berupa kajian tentang peran *civil society* dalam proses

perdamaian di Patani, khususnya pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar).

- b. Manfaat praktis, diharapkan menjadi salah satu sumber informasi pengetahuan sebagai alternatif dan bahan acuan oleh peran *civil society* untuk mengembangkan kepada masyarakat Patani maupun masyarakat umumnya.

E. Kajian Pustaka

Sebagai salah satu bahan acuan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan penelitian yang akan dilakukan tidak menjadi pengulangan dari penelitian sebelumnya, dari berbagai literatur yang ditemukan peneliti yang berkaitan dengan topik yang sesuai dengan penelitian yang dibahas antara lain:

Pertama, penelitian Mr. Marwan Yotha yang berjudul “*Peran Radio Komunitas “Media Selatan” Dalam Proses Perdamaian-Konflik di Patani Thailand Selatan*” (2019). Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran radio komunitas Media Selatan dalam proses perdamaian-konflik di Patani Thailand Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatan dalam melaksanakan perannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran radio komunitas Media Selatan dalam proses perdamaian-konflik di Patani, Thailand Selatan telah dilaksanakan dengan baik, melalui program acara *talkshow* dan diskusi bersama pendengar, menyampaikan informasi seputar isu perdamaian dan edukasi, menciptakan *area central* sebagai tempat bersuara, *safety voice* dan lain-lainnya. Sementara hasil dari penelitian mengenai faktor yang mendukung berjalannya program acuan

radio Media Selatan dalam proses perdamaian konflik di Patani Thailand Selatan yaitu adanya dukungan dan kerja sama dengan baik antara pendengar di wilayah tersebut dengan radio Media Selatan, adanya relasi kerja sama dengan lembaga *civil society*, media internasional dan para akademisi dalam perannya, adapun sumbangan perdanaan bantuan dari lembaga internasional. Sedangkan faktor yang menghambat berjalannya suatu peran atau program radio komunitas Media Selatan dalam membangunkan perdamaian tersebut, yaitu dana yang kurang, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), adanya masalah dalam pemancaran sinyal radio dan represif pemerintah Thailand dan penutupan siaran radio Media Selatan.¹¹

Kedua, penelitian thesis judul “*Peran Civil Society Organizations Dalam Proses Perdamaian di Patani*” yang disusun oleh Faisol Mamang (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan usaha titik temu serta penyelesaian konflik baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok di dalam masyarakat Muslim Patani. Dengan kata lain, penelitian ini membahas dan menelusuri jawaban dan pertanyaan bagaimana peranan kelompok masyarakat sipil (*civil society*) Melayu-Muslim dalam melakukan usaha untuk membangunkan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik di Patani Thailand Selatan.¹²

Hasil penelitian tersebut, Faisol Mamang menyimpulkan bahwa sudah sejak masa panjang melanda konflik wilayah

¹¹ Marwan Yotha, Skripsi, “*Peran Radio Komunitas “Media Selatan” Dalam Proses Perdamaian-Konflik di Patani Thailand Selatan,*” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hal. 106.

¹² *Ibid.* hal. 21.

Patani tersebut di bawah kongkong pemerintahan pusat Bangkok, Thailand, munculnya gerakan *civil society* yang menguat untuk perdamaian ini bisa dibilang fenomena baru yang memberi harapan bagi terwujudnya perdamaian yang lebih kuat. Ada beberapa ciri penting dari peran *civil society* dalam proses tersebut, di antaranya adalah mereka sejauh mungkin mengambil jarak dari kelompok-kelompok gerakan nasionalis atau separatis dalam strategi perjuangannya. Dengan mengambil jarak tersebut, mereka berdiri sentral di antara pemerintahan pusat Thailand dan kelompok-kelompok separatis sendiri yang seringkali saling berbeda aspirasi dan juga antara kaum Muslim di wilayah tersebut dengan pemerintahan pusat Bangkok.¹³

Ketiga, penelitian Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum yang membahas masyarakat Muslim di Thailand Selatan (Patani) dan Filipina Selatan (Mindanao) dalam mencari jalan damai dari konflik berkepanjangan dengan pemerintah dan mayoritas di negara tersebut. Walaupun separatisme masih ada, namun upaya negosiasi terus dilakukan oleh masyarakat sipil ini. Ciri-ciri mereka adalah bersifat netral, mengambil jarak dengan separatis, namun tidak memutus komunikasi menjadi representasi dalam upaya perdamaian dengan pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai organisasi *civil society* di kedua wilayah Muslim itu cenderung mengambil jarak atau bersikap imparial dari kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi antara kelompok yang mengutamakan integrasi. Namun demikian, organisasi-organisasi itu tetap membawa aspirasi yang bersifat substantif, seperti aspirasi

¹³ *Ibid.* hlm. 332.

pengelolaan sendiri sumber daya alam dan usaha membangun pemerintahan sendiri (*self-government*). Penguatan *civil society* dalam resolusi konflik itu berjalan seiring dengan proses globalisasi, yang pada gilirannya menunjukkan fenomena yang paradoks.¹⁴

Keempat, kajian thesis oleh Apichaya O-in telah membahas fungsi organisasi masyarakat sipil lokal khusus tingkat lapangan yang mendapatkan bantuan dana dari beberapa LSM nasional dan NGOs asing dalam menguatkan hak-hak sipil dapat mengembangkan secara mendalam hingga masyarakat desa mampu secara keilmuan dan secara praktisi terhadap situasi konflik dalam rangka jangka panjang masyarakat desa mampu membela secara mandiri dan tidak hanya menjadi alat politik bagi pemerintah maupun gerakan dan lebih mengarahkan keterbukaan ruang publik dalam proses demokratisasi dan perdamaian.¹⁵

Kelima, penelitian Don Pathan tentang manajemen konflik di Asia dengan fokus kajian peran *civil society* di Thailand Selatan yang mendapat dukung bantuan dana dari *The Asia Foundation* dengan tulisannya membahas kelompok persenjataan bagi gerakan pembebasan. Namun pada waktu itu tidak begitu banyak CSOs yang mengambil peran atas sikap bertanggung jawab oleh karena kondisi sewaktu itu mungkin tidak aman pada semua daerah semakin menjadi zona konflik

¹⁴ Ahmad Suaedy, "*Dinamika Muslim Mencari Jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*", (Jakarta: The Wahid Institute, 2012). hal. 2.

¹⁵ Apichaya O-in, "*Partnership of International Funding Agencies and Civil Society Organizations in Peacess Process in Southern Border Provinces of Thailand*," (Bangkok: Chulalongkorn University, 2012). (Kajian Thesis ini tidak diterbitkan).

seluruhnya malah menambah undang-undang istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat atas kestabilan negara.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini jelasnya lebih spesifik atau khusus pada satu subyek yakni Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar) dan meneliti dengan bertujuan mengetahui peran dari lembaga tersebut serta partisipasi *civil society* dalam proses perdamaian konflik di daerah tersebut.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisa permasalahan di atas maka tentu diperlukan sesuatu teori. Teori menggambarkan serangkaian konsep yang membentuk pemahaman menjadi satu, serta berfungsi untuk memberikan hipotesa secara sistematis disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomena-fenomenanya serta data-data yang ada akan sulit dipahami.

a. Peran

Peran artinya pemain dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Secara garis besar menurut Soekanto menjelaskan bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), juga merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, mempunyai arti penting bagi sistem sosial dalam pola-pola yang mengatur hubungan timbal

¹⁶ Don Pathan, “*Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand’s Deep South*,” (Bangkok: The Asia Foundation, 2012), Bahasa Inggris dan Thailand).

balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat, dan tingkah laku individu-individu.¹⁷

Menurut Levison dalam buku sosiologi suatu pengantar Soekanto, peran mencakup tiga hal;

- 1) Peranan meliputi berbagai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Oleh karena itu, peran menjadi suatu yang penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, organisasi atau suatu lembaga yang ada di masyarakat. Peranan yang ada di masyarakat dapat diklasifikasi dengan bermacam-macam cara, sesuai dengan banyak sudut pandang yang diambil. Sehingga masyarakat membutuhkan dengan adanya diharapkan dapat dilaksanakan secermat-cermatnya, lengkap sesuai dengan peraturan.

b. Konsep *Civil Society*

Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan *civil*

¹⁷ Soerjono Soekanto. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, edisi 2015 (Jakarta: Rajawali Press), hal. 210.

society yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. *Civil society* di sini didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim absolut.

Civil society menjadi penting apabila ia dapat menjadikan benteng yang menolak intervensi negara yang bertindak berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Melalui kelompok-kelompok mandiri tersebut itulah rakyat dapat memperkuat posisinya *vis-a-vis* negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berkuasa baik individu maupun kelompok dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap negara.

Sementara, pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan para cendekiawan, mahasiswa, pemimpin agama, dan sebagainya ikut berfungsi sebagai pengontrol

kiprah negara.¹⁸ *Civil society* yang didalamnya memiliki nilai-nilai moral tertentu, akan dapat membentengi rakyat dan masyarakat dari gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai tersebut itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat publik misalnya, maka akan dapat dikendalikan sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif yang menjadi motor kapitalisme.

Kehadiran *civil society* di dalam rakyat modern ini tentu tidak terlepas dari hadirnya unsur-unsur struktural dan kultur inheren di dalamnya. Unsur pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan kehadiran organisasi-organisasi kepentingan publik. Pada saat yang sama, *civil society* akan berkembang dan mejadi kuat apabila unsur-unsur kultural yang menjadi landasannya juga kuat. Unsur tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleransi antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata

¹⁸ Azyumardi Azra, “Menuju Masyarakat Madani, “Gagasan, Fakta, dan Tantangan”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 3.

sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

Konsepsi Anwar Ibrahim sejati merupakan pengembangan dari diskursus konsepsi dan model gerakan *civil society* yang berkembang di Negara-negara Barat sejak abad ke-17. Di Negara-negara Barat, istilah *civil society* muncul karena adanya dominasi dan otoritarian dalam praktik kekuasaan oleh penguasa Negara yang otoriter, memaksa masyarakat untuk menyusun kekuatan dalam rangka melakukan perebutan atas sebuah dalam praktik bernegara. Pada perkembangannya, konsepsi *civil society* di Negara-negara Barat (terutama Eropa Barat) mengalami proses dominasi dan pasang surut pada tataran praksis. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat di negara tersebut juga telah berupaya mendorong terciptanya pergerakan sosial yang berbasis pada solidaritas.¹⁹

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya dengan aktivitas yang mandiri dalam suatu ruang gerakan yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Masyarakat madani sebagai bagian dari komunitas yang berproses untuk menciptakan dan menghadirkan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara secara kontinyu harus mengacu pada nilai-nilai kesepakatan bersama untuk membangun ikatan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Oleh karena itu,

¹⁹ Dede Rosyada dkk, “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*,” ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 240.

terkait erat konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tumbuh pada masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis.

Dalam perspektif Suseno, terwujudnya masyarakat madani sebagian berjalan sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan politik ditingkat struktural, oleh karena itu kondisi yang kondusif perlu diciptakan, pertama deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan terutama hal-hal seperti kartel, monopoli, dominasi dan sistem koneksi atas prestasi ekonomi, kedua keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam konteks tahap tertentu sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong terjadinya demokratisasi.²⁰

Ketiga perwujudan negara hukum secara efektif, termasuk menjamin perlindungan HAM. Sikap dan perilaku masyarakat madani sebagai warganegara yang memiliki hak dan kebebasan juga harus menjadi *equal rights*, yaitu memperlakukan sesama warganegara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka pemaksaan kehendak oleh individu atau kelompok masyarakat kepada individu atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip masyarakat madani.

²⁰ Agus Widjojo. “Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi”, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 4.

Menurut perspektif A.S Hikam, *civil society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap di sebutkan dengan istilah aslinya tanpa diterjemahkan dengan istilah lain atau tetap berpedoman dengan konsep *de' Tocquville* merupakan wilayah sosial terorganisir yang mempunyai ciri-ciri antara lain: Kesukarelaan (*voluntary*), Keswasembadaan (*self-generating*), Keswadayaan (*selfsupporting*), serta kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang di ikuti oleh warganya. Jadi *civil society* menurut AS Hikam adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara tinggi terhadap negara dan keterikatan dengan norma serta nilai hukum yang diikuti warganya.²¹ *Civil society* yang disebut masyarakat madani sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat terutamanya ketika berhadapan dengan negara, adanya ruang publik bebas (*the free public sphere*) sebagai wahana dari keterlibatan politik secara aktif warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.²²

²¹ Muhammad AS Hikam. "*Demokrasi dan Civil Society*", (Jakarta: LP3S, 1996), hal. 3.

²² Sufyanto, Masyarakat Tamadun : *Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001), hal. 113-115.

Menurut AS Hikam *civil society* sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai 3 ciri khusus yaitu :

1. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara demi kepentingan publik.
3. Adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

Civil society dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar *self reliance* (percaya diri) *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela) dan taat akan nilai dan norma-norma yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar, intervensi Negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang-undang tidak ditegakkan. Dalam *civil society* swasembada adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan.

Konsep *civil society* dipahami dari perspektif yang berbeda-beda dan hal itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai konteks, *setting*, ideologi dan kepentingan setiap subjek. Dalam pendekatan Hegelian penekanannya

lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaan, khususnya pada sektor ekonomi bagi pembangunan *civil society* yang kuat, sementara itu dalam perspektif Gramscian, penguatan *civil society* sebagai alat untuk menghadapi hegemoni ideologi Negara. Pemahaman Gramsci melihatnya sebagai super struktur dimana proses perebutan posisi hegemonik terjadi.²³ *Civil society* adalah sebuah arena tempat intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Negara dalam pendekatan *toqueveellin* penguatan *civil society* lebih menekankan pada penguatan organisasi-organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat.

Civil Society Organization (CSOs) yaitu semua organisasi atau asosiasi yang berada di luar sektor Negara, mereka mencakup organisasi ketetanggaan yang kecil, lokal hingga organisasi berbasis keanggotaan berorientasi nasional. Bagi Larry Diamond, sebagaimana di kutip oleh Suharko *civil society organization* adalah organisasi atau asosiasi yang ada di luar Negara bersifat bebas dan independen, *civil society organization* mencakup organisasi baik yang formal maupun informal yang dapat di kategorikan sebaga berikut :

- a. Bersifat ekonomis: Asosiasi dan jaringan produktif dan komersial.
- b. Bersifat kultural: institusi atau asosiasi religius, etnis, komunal, dan asosiasi-asosiasi lain yang

²³ *Ibid*, hal. 3.

- mempertahankan hak-hak nilai-nilai keyakinan dan simbol kolektif.
- c. Bersifat informasional dan edukasional: organisasi yang memiliki bidang gerak pada produksi dan diseminasi (baik untuk tujuan perolehan profit atau tidak) pengetahuan ide berita dan informasi publik.
 - d. Berkaitan dengan kepentingan (*interes*): kelompok-kelompok yang berupaya memajukan atau mempertahankan kepentingan-kepentingan fungsional atau material bersama untuk para anggotanya seperti serikat buruh, kelompok profesional dll.
 - e. Berkaitan dengan pembangunan (*development*) organisasi-organisasi yang mengumpulkan sumber daya dan bakat-bakat individual untuk memperbaiki infrastruktur, kelembagaan dan kualitas kehidupan komunitas.
 - f. Berorientasi isu (*issue-oriented*): gerakan untuk perlindungan lingkungan, reformasi, agraria perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, etnis minoritas, kelompok adat, kaum difabel dan korban-korban lain dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - g. Berorientasi *civic*: kelompok-kelompok non partisan yang berupaya memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis, seperti kelompok-kelompok yang bekerja untuk HAM. Pendidikan dan memobilisasi pemilih, pemantauan pemilu, dan pengungkapan praktik-praktik korupsi dll.

- h. Berhubungan dengan “*the ideological marketplace*” aliran informasi dan ide-ide yang mencakup kelompok-kelompok yang mengevaluasi dan mengkritisi negara, seperti media massa yang independen, dan area-area yang lebih luas dari aktivitas kultural dan intelektual yang otonom seperti Universitas, kelompok pemikir dll.

Pengertian *Civil Society Organization* (CSOs) menurut Suharko ada lima karakteristik yaitu :

1. CSOs memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan-tujuan publik dari pada tujuan privat.
2. Berhubungan dengan Negara dalam berbagai cara namun tidak berupaya untuk memenangkan kontrol atas posisi dalam Negara.
3. Tidak berupaya untuk *govern the polity as a whole* apa yang ingin diraih oleh CSOs dari Negara biasanya berkaitan dengan perubahan kebijakan reformasi, kelembagaan, akuntabilitas Negara.
4. Tidak berupaya memonopoli ruang politik dan fungsional dalam masyarakat.
5. Mempresentasikan kepentingan kelompok yang berbeda-beda atau meliputi aspek-aspek yang beragam dari suatu kepentingan.²⁴

Konsep *civil society* yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial politik di Indonesia sebagai entitas independen masyarakat madani (*civil society*) yang

²⁴ Oman Sukmana, “*Konsep Dan Teori Gerakan Sosia*”, (Malang : Intrans Publishingm 2016), hal. 210-220.

merupakan representasi dari banyak lembaga-lembaga independen di luar *state* telah mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak rakyat, di Iran basis utama masyarakat madani adalah (secara literal berarti “lingkaran”) yang merupakan kelompok informasi individu-individu yang bertemu secara periodik. Kelompok ini dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan profesi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi, sedangkan di Jerman, *civil society* hadir sebagai jawaban atas krisis *welfare state*, di Perancis *civil society* muncul sebagai jawatan untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok *face to face* dengan Negara. Elemen penting lain dari *civil society* adalah ekonomi pasar, media komunikasi yang independen, faktor-faktor keahlian dalam semua aspek kebijakan pemerintah yang independen dari pengaruh negara, dan jaringan kelompok-kelompok sukarela yang berkembang secara leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu orang-orang menangani urusan-urusan mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, *civil society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari *state*. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. *Civil society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara

lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Pandangan Hegel tentang *civil society*, yang ia samakan dengan *buengerlicbe gesellschaft*, belakangan mendapat dukungan kuat, termasuk dari Kalr Marx.²⁵

Sedangkan pemikir politik terpenting abad ke XX berkebangsaan Italia Antonio Gramsci (1891-1973) mengemukakan gagasannya tentang hegemoni yang merupakan landasan alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci tentang masyarakat madani memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi Gramsci di zamannya terjadi konfliktual dan dialektika antara “negara” (*state*) dan “masyarakat madani” (*civil society*) dalam analisisnya tentang supremasi dan hegemoni sementara yang lain (negara) merupakan arena publik yang dikontrol dengan hegemoni oleh kekuasaan negara. Bagi Gramsci masyarakat madani adalah suatu dunia dimana rakyat berhak membuat perubahan dan sejarah masa depan masyarakat mereka.

Kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan ruang bagi eksisnya masyarakat madani. Negara tidak mempunyai alasan untuk mendikte masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran masyarakat madani merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara. Antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) harus terjadi *check and balance* dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Dalam sistem

²⁵ *Ibid*, hal. 2.

demokratis, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh kepada hukum, dengan berpegang pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada hukum kehidupan bernegara berjalan di atas kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan segelintir kepentingan kelompok dan individu.²⁶

c. Perdamaian

Peace atau damai bisa dikatakan sebagai tujuan dan atau bahkan mimpi bersama semua pendudukan bumi. Mengapa demikian? Perang yang terjadi dalam sejarah umat manusia telah menimbulkan trauma yang mendalam dan kekhawatiran akan terjadinya hal yang serupa. Oleh karena itu, berbagai macam cara dilakukan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dari sebelumnya.²⁷

Secara sederhana, setiap manusia tentu menginginkan kehidupan penuh dengan kedamaian, terbatas dari tekanan ekonomi, politik, dan sosial; kemudian bisa melakukan berbagai macam aktivitas tanpa ada ancaman terror ataupun penindasan dan bayang intimidasi oleh pihak manapun. Menurut Johan Galtung seorang tokoh kajian perdamaian dalam AA Banyu Perwita (2015) mengatakan bahwa secara mendasar “*Peace is The absece/reduction of violence of kinds*”. Bayak di antara kita

²⁶ Syarifuddin Jurdi, “*Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani*”. Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 6 No. 2, 2011, hal. 3-6.

²⁷ Ajoe Lara Putra. 2017. *Peran Malaysia Dalam Proses Perdamaian di Thailand Selatan Periode 2015-2016*. (Skripsi Mahasiswa Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hal. 3.

baru mampu mengetahui dan merasakan kondisi damai dan perdamaian tatkala kondisi tersebut tidak ada. Dengan kata lain, kita membutuhkan perdamaian tatkala kita sedang berada pada kondisi konflik.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, untuk dapat mengungkapkan lebih dalam pandangan dari berbagai individu dan kelompok maka peneliti berusaha untuk bertemu dan melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat, para pemimpin dan tokoh yang berbeda-beda dan menginformasikan yang dianggap lebih netral. Peneliti juga melakukan kroscek aktor-aktor yang terlibat langsung atau fokus terhadap perilaku para aktor yang terlibat dan alasan-alasan rasional yang mendasarinya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pandangan sosial politik mereka.

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, metode ilmiah adalah suatu kerangka landasan yang diikuti bagi terciptanya pengetahuan akademik.²⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji, suatu pengetahuan serta usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

²⁸ *Ibid*, hal. 4.

²⁹ Dudung Abdurrahman, “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Kumia Kalam Semesta, 2003), hal. 1.

³⁰ Lexy J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 43.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pertimbangan penggunaan metode ini karena data yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan perhitungan.

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dijadikan peneliti untuk memperoleh sumber data penelitian ini adalah Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar), dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih orang tertentu sesuai kriteria yang dibutuhkan, baik itu pemimpin, staf anggota, maupun institusi yang dijadikan mitra dalam pelaksanaan lembaga tersebut dalam peran proses perdamaian di Patani, serta informasi berita, artikel, buku, arsip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dijadikan subyek sekunder penelitian ini dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan peran lembaga dalam proses perdamaian konflik Patani.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.³¹ Teknik pengumpulan data yang di maksud data penelitian ini adalah cara-cara yang penulis lakukan dalam upaya mendapatkan data yang terdapat objek penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk penelitian kualitatif

³¹ Imam Suprayogo & Tibrani, “*Metodologi Penelitian Sosial Agama*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 167.

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dalam proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dengan subyek peneliti. Metode wawancara mendalam dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai.³² Wawancara yang biasa digunakan penelitian pendekatan kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang memberikan kemungkinan bagi informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok secara terinci, sedangkan peneliti menanyakan atau mempertanyakan lebih terinci terhadap setiap jawaban dan pertanyaan informan.³³

Wawancara mendalam ini dilakukan dengan beberapa pihak yang dianggap berwenang dan mengetahui seluk-beluk masalah yang diteliti. Dalam hal ini wawancara akan diajukan kepada Tuwaedaniya Tuwaemaengae adalah Direktur Lemabaga Parani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar), staf

³² Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 36.

³³ Nawari Ismail, “*Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Panduan Praktis dan Diskusi Isu*”, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2015), hal. 92.

anggota, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik dokumentasi. Bentuknya dokumen resmi berupa monografi Lempar, dokumen sejarah Lempar, arsip laporan, gambar-gambar, buku catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lempar. Selain itu, dokumentasi juga dijelaskan teori yang digunakan telaah keputusan didapat dari sumber informasi seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, majalah yang kiranya dapat mendukung penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode milik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Penelitian ini memilah-milah serta mengelompokkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka. Beberapa data yang tidak penting kemudian dipisahkan, sedangkan data-data yang penting akan peneliti tinjau kembali untuk diolah serta dianalisis dengan teori yang telah peneliti tetapkan.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti memilah-milah serta mengelompokkan data yang telah

³⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247.

didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka. Beberapa data yang tidak penting kemudian dipisahkan, sedangkan data-data yang penting akan peneliti tinjau kembali untuk diolah serta dianalisis dengan teori yang telah peneliti tetapkan.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya, peneliti melakukan pengorganisasian atau penyusunan data dari data-data yang telah direduksi sebelumnya. Peneliti melakukan pengorganisasian berdasarkan hubungan antar kategori yang kemudian disajikan secara naratif. Penyajian data yang dilakukan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan.³⁵ Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menampilkan data hasil wawancara, dokumentasi, pustaka secara naratif, penelitian ini juga menampilkan kutipan wawancara dari beberapa informan guna mendukung hasil penelitian.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dianalisis dengan teori, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan sebelumnya.³⁶ Menarik kesimpulan dari pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian

³⁵ *Ibid*, hal. 249.

³⁶ *Ibid*, hal. 252.

terkait upaya Peran Civil Society Dalam Proses Perdamaian Di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian Dan Pembangunan).

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan di dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan bahasan. Adapun pembagian bab dalam skripsi ini dapat diurutkan sebagai berikut:

Bab pertama; berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dalam bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi.

Rangkaian dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua; berisi tentang gambaran umum penelitian yakni kemunculan gerakan *civil society* dalam proses perdamaian Patani dan profil sejarah berdiri Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan.

Bab ketiga; sebagai fokus perhatian dalam skripsi ini yakni Peranan Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan dalam proses membangun perdamaian di Patani.

Bab keempat; hasil analisis data yang membahas tentang Peranan Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan dalam proses perdamaian di Patani.

Bab kelima; berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian, dan diakhiri mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam

penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji kevaliditas data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peran *Civil Society* Dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan). Maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar) dalam proses perdamaian di Patani, Thailand Selatan, telah dilaksanakan dengan baik, melalui program kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) membuka ruang politik dan memperluas jaringan diantara masyarakat-masyarakat terutamanya masyarakat yang jadi korban pelanggaran HAM agar mereka memiliki ruang dapat menentukan nasibnya sendiri dan menuntut hak keadilan, kebebasan dalam negara demokrasi sesuai standar dunia internasional yang menghormati hak kebebasan.
2. Sedangkan peranan Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar) melalui program penguatan masyarakat yaitu mengorganisir rakyat untuk melahirkan pelopor-pelopor (*peace maker*) dengan penuh kesadaran politik, kedewasaan politik, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma proses hukum, serta berani mengeluarkan

suara di dalam hati untuk menentukan hasil kedamaian dengan sebenarnya.

B. Saran-saran

1. Untuk Lempar terus melakukan program dalam bentuk aksi kampanye dan advokasi terutama bagi masyarakat yang jadi korban pelanggaran HAM agar hak asasi, hak-hak sipil dan politik, hak keadilan, dan hak kebebasan harus dijaga.
2. Untuk Lempar terus mengorganisir rakyat dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat di kawasan merah (*red zone*) agar memiliki kesadaran politik dan kedewasaan politik sehingga masyarakat dapat menentukan sikap politik diri sendiri dalam menentukan nasibnya dalam proses perdamaian di Patani.
3. Untuk Lempar membentuk generasi-generasi yang sanggup memikul amanah penderitaan rakyat dan terus membawa strategi Lempar sampai ke arah kemuncak kejayaan dalam arti rakyat Patani dapat menentukan nasib diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malek, M. Zamberi. 1993. "*Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*", Kuala Lumpur: Hizbi Shah Alam.
- Mohd Roslan Mohd Nur, *Konflik Selatan Thailand: Peranan Malaysia Sebagai Negara Jiran*, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Mei 2017.
- Gede Richard Pramudita. 2015. *Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan tahun 2004-2006*, Bachelor thesis, University Udayana.
- Tuwaemaengae Tuwaedaniya. *Patani Merdeka di atas Jalan Raya*, Pattani: Awan Book, 2013.
- Faisol Mamang. 2017. *Peran Civil Society Organization dalam Proses Perdamaian di Patani. Thesis Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marwan Yotha, Skripsi, "*Peran Radio Komunitas "Media Selatan" Dalam Proses Perdamaian-Konflik di Patani Thailand Selatan*," Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suaedy Ahmad, "*Dinamika Muslim Mencari Jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*", (Jakarta: The Wahid Institute, 2012).
- Apichaya O-in, "*Parnership of International Funding Agencies and Civil Society Organizations in Peacess Process in*

Southern Border Provinces of Thailand,” (Bangkok: Chulalongkorn University, 2012).

Don Pathan, “*Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand’s Deep South*,” (Bangkok: The Asia Foundation, 2012), Bahasa Inggris dan Thailand).

Soekanto Soerjono, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, edisi 2015 (Jakarta: Rajawali Press).

Azra Azyumardi, “*Menuju Masyarakat Madani, “Gagasan, Fakta, dan Tantangan*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, September 1999).

Rosyada Dede, dkk, “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Prenada Media, 2000).

Widjojo Agus. “*Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*”, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

AS Hikam Muhammad. “*Demokrasi dan Civil Society*”, (Jakarta: LP3S, 1996).

Sufyanto, “*Masyarakat Tamadun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001).

Sukmana Oman, *“Konsep Dan Teori Gerakan Sosia”*, (Malang : Intrans Publishingm 2016)

Jurdi Syarifuddin, *“Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani”*. Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 6 No. 2, 2011.

Ajoe Lara Putra. 2017. *Peran Malaysia Dalam Proses Perdamaian di Thailand Selatan Periode 2015-2016*. (Skripsi Mahasiswa Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Abdurrahman Dudung, *“Pengantar Metode Penelitian,”* (Yogyakarta: Kumia Kalam Semesta, 2003).

Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif,”* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

Imam Suprayogo & Tibrani, *“Metodologi Penelitian Sosial Agama”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

Azwar Saifuddin, *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Nawari Ismail. 2015. *“Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Panduan Praktis dan Diskusi Isu”*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru).

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Arifin Bin Cik, Dkk, "*Patani; Sejarah dan Politik dalam Dunia Melayu*", (Songkhla: Yayasan Kebudayaan Islam Selatan, 2007).

Praserkul Seksant, "*Politik Civil dalam Sistem Demokrasi*", (Bangkok: Wiphasa Press, 2010).

Derek Suthisak, Dkk, "*Advokasi Perundangan bagi Komunitas Lokal di Kawasan Provinsi Selatan*", (Pattani: Institute Studi Islam PSU Pattani, 2011).

Mutalib Hussin, "*Islam dan Etnisitas Perspektif Melayu*", (Jakarta: LP3ES, 1995).

Pitsuwan Surin, "*Islam di Muangthai; Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*", (Jakarta: LP3ES, 1989).

Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*," (Jakarta : ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006),

Burhanuddin, 2003 *Civil Society & Demokrasi: Survey tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta*. Ciputat: Indonesia Institute fo Civil Society (INCIS).

A. Ubaidillah, et al, "*Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*", IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.

Hasan Wirajuda, *“Hak Asasi Manusia Tentang Tanggung Jawab Negara Peran Institusi dan Masyarakat”*, (Jakarta: Komnas HAM, 1999).

Rhona K. M. Smith, dkk, *“Hukum Hak Asasi Manusia”*, Cet. I, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).

Sefriani, *“Self Determination Right bagi Aceh HAM versus integritas wilayah NKRI”*, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 24, (September 2003).

Johan Galtung & Charles Webel. *“Studi Perdamaian dan Konflik”*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

Berita dan Website:

Deep South Watch [deepsouthwatch.org], 100 Tahun Undang-Undang Darurat Dalam Negara Thailand, <https://deepsouthwatch.org/th/node/5462?fbclid=IwAR3QiooNbfXMWEAKeLgdUD26UWR7SjPfdZdGsvs1E9oMvhjXmXJNauFWpxk>. Diakses tanggal 12/3/2014. Pukul 17:19 WIB, (Bahasa Thailand).

Kiblat Net [kiblat.net], 11 Tahun Demonstrasi Pattani, Melayu Muslim Thailand Selatan Konsisten Tuntut Haknya, <https://www.kiblat.net/2018/06/01/11-tahundemonstrasi-pattani-melayu-muslim-thailand-selatan-konsisten-tuntut-haknya/>. Diakses tanggal 1/6/2018. Pukul 15:11 WIB. (Bahasa Thailand).

Prachatai [prachatai.com], Para Pengunjuk Rasa di Masjid Pusat, Pattani Bercerai, <https://prachatai.com/journal/>

2007/06/12964. Diakses tanggal 5 Juni 2007. Pukul 12:35 WIB.

Deep South Watch [deepsouthwatch.org], Pelajaran ‘Demonstrasi Besar Patani 75-an dan 50-an’ Mahasiswa Harus Bergerak Dengan Cara Damai”, https://deepsouthwatch.org/dsj/th/11187?fbclid=IwAR2De-d1PBFIZqNcFKCnMxNk2JPRBtwnf_aijQF5gggW7K5ZQI4dp5WinY. Diakses tanggal 8/6/2017. (Bahasa Thailand).

Prachatai [prachatai.com], Patani dan Tiga Provinsi Selatan Politik Aksen, <https://prachatai.com/journal/2015/09/61358>. Diakses tanggal 12/9/2015. Pukul 17:24. (Bahasa Thailand).

Patani Forum [pataniforum.com], Cerita Saat Menyesap Teh dan Seminar Patani di Kedai Kopi Chiangmai, http://www.pataniforum.com/single.php?id=523&fbclid=IwAR23I7NilMi_aqoHvNthqyL8Z Zem2n9qN9awKFXp8IjF8G5WQJPJwvjU5_Y. Diakses tanggal 9/7/2015. Pukul 13:19. (Bahasa Thailand).

Dokumentasi:

Buku panduan Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan yang diambil tanggal 27 Januari 2019.

Dokumentasi; *Civil Society Network for Peace* yang diambil pada tanggal 30 Mei 2019

Wawancara:

Tuwaedaniya Tuwaemaengae, Direktur Umum Lempar
Arthit D. Thongin, selaku dosen tetap Jurusan Ilmu Politik,
Sukhothai Thammathirat University.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Interview Guide

Pedoman Wawancara Untuk Personal

Berikut pertanyaan yang saya ajukan:

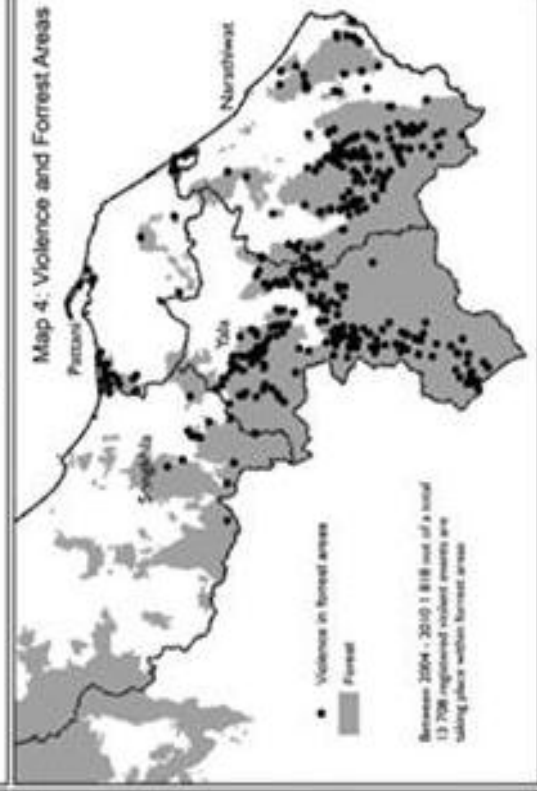
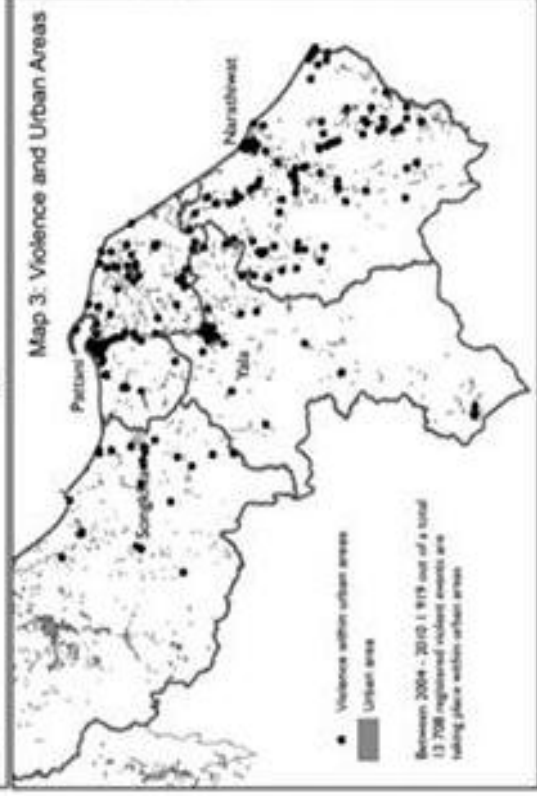
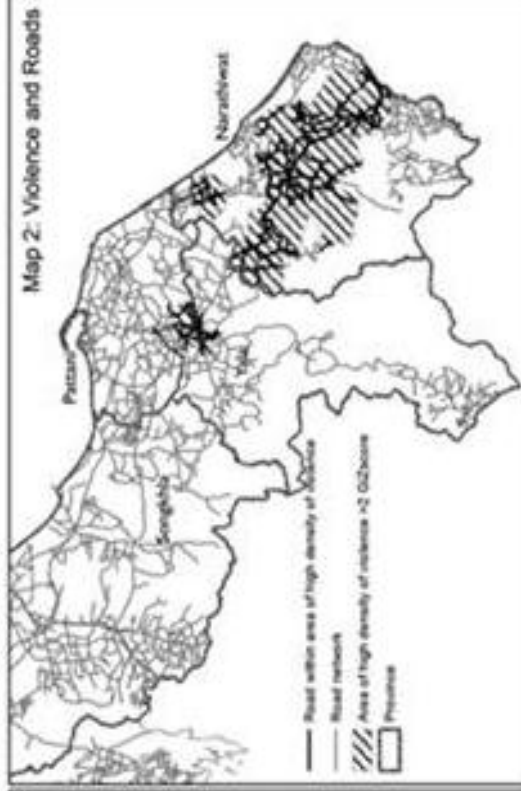
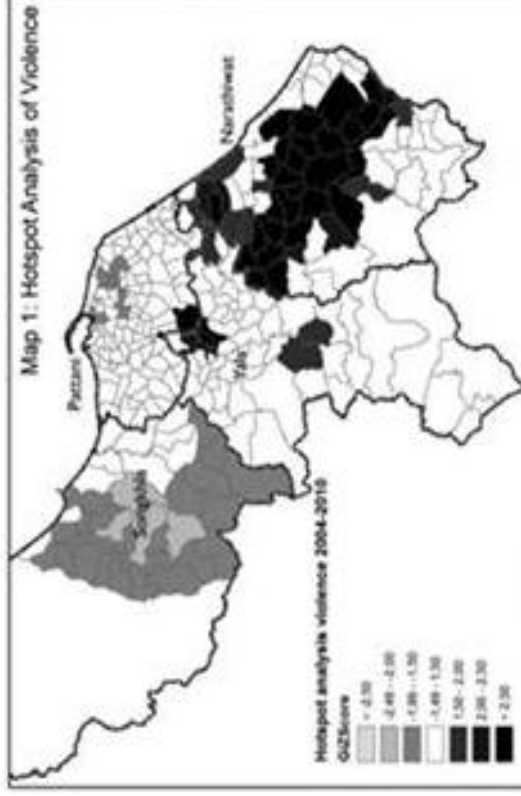
1. Apakah yang menjadi landasan, motivasi, semangat Tuwaedaniya dan kawan-kawan untuk aksi demonstrasi tahun 2007?
2. Bagaimana pendapat Anda terhadap proses dialog perdamaian antara pemerintah Thailand dan kelompok gerakan pembebasan Patani? Apakah sejauh ini rakyat Patani terlibat berperan dan partisipasi di dalamnya?
3. Apakah Arthit mengetahui tentang LEMPAR?
4. Bagaimana pendapat Anda terhadap peranan LEMPAR dalam proses membangun perdamaian di Patani?
5. Bagaimana pendapat Anda terhadap program jaringan kampung damai yang digerakkan oleh LEMPAR?
6. Dari program jaringan kampung damai, apakah yang Anda melihat hasil yang didapatkan oleh masyarakat?
7. Sebagai orang dari luar kawasan (warga Bangkok), apakah pendapat Anda untuk jalan keluar atau solusi bagi menyelesaikan konflik dan perdamaian di Patani? Seperti apakah kedamaian yang diinginkan bagi orang Patani?

Pedoman Wawancara Untuk Organisasi LEMPAR

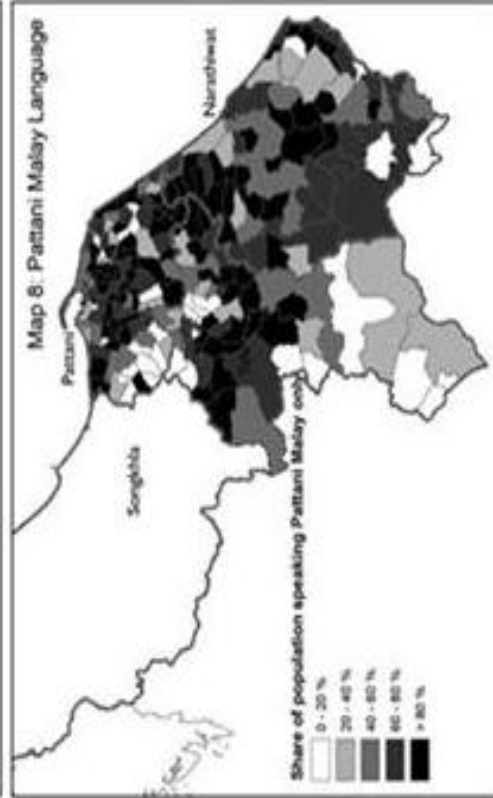
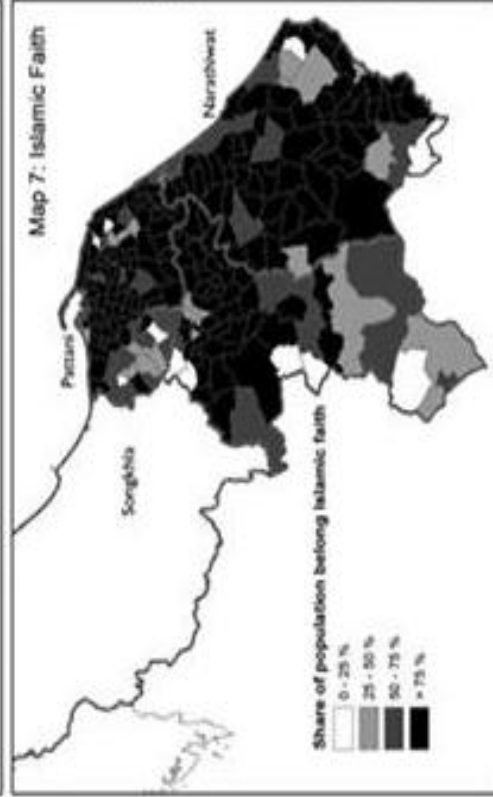
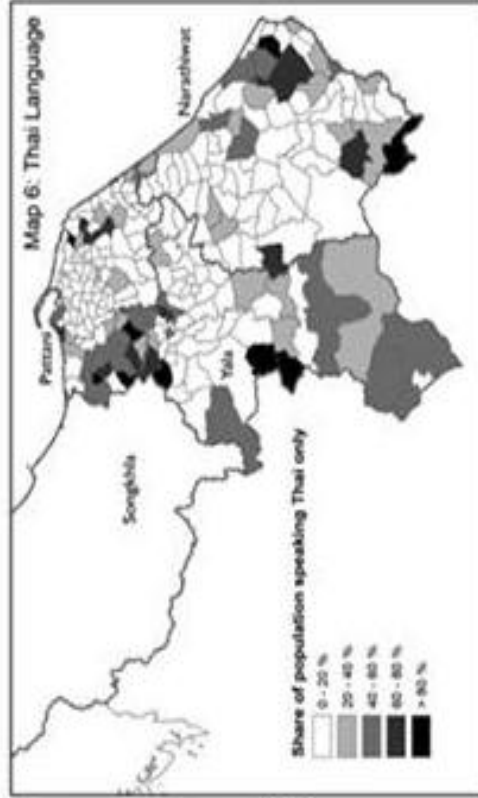
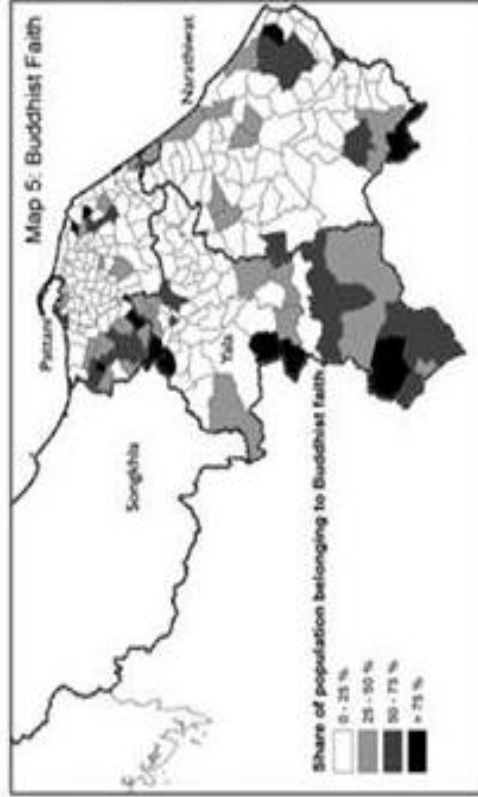
Berikut pertanyaan yang saya ajukan:

1. Apakah prinsip LEMPAR?
2. Bagaimana strategi LEMPAR?
3. Bagaimana kondisi LEMPAR?
4. Bagaimana sejarah berdirinya LEMPAR?
5. Bagaimana struktur kepengurusan LEMPAR?

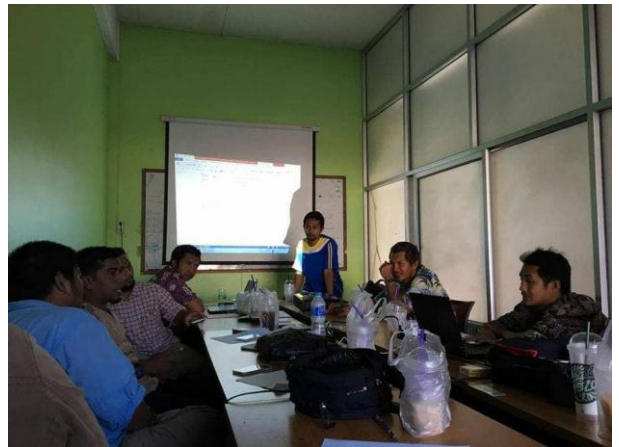
6. Bagaimana harapan LEMPAR untuk ke depan?
7. Siapa yang menggagas terbentuknya LEMPAR?
8. Apa saja peranan yang telah dilakukan LEMPAR?
9. Apakah peranan LEMPAR yang dianggap sangat berhasil?
10. Bagaimana peranan LEMPAR membangun perdamaian Patani?
11. Bagaimana program jaringan kampung damai dan pengembangan masyarakat telah dilakukan LEMPAR?
12. Bagaimana pandangan orang lain terhadap LEMPAR dalam bergerak perdamaian? Respons dari pemerintah?
13. Apakah pendapat tentang zona merah/kawasan kampung merah? Apakah itu menjadi daerah strategi untuk LEMPAR bergerak?



Maps (Continued)









لمباک فتاني راي اوتتوق کدامين دان فباغونن

Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan
The Academy of Patani Raya for Peace and Development
สำนักปาดานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

Sekretariat: Jalan Charoenpradit No. 17/291, Mukim Rusamilae, Distrik Muang, Provinsi Pattani

SURAT KETERANGAN

20 April 2019

No : ISTIMEWA/LEMPAR/PTN/IV/2019
Sifat : Penting
Prihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

**Kepala Prodi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Republik Indonesia**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami atas nama pengurus Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) telah mengakui bahwa mahasiswa di bawah ini:-

Nama : Mr. Muhammad Awae
nim : 13720059
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Negara : Republik Indonesia
Judul Skripsi : Peran Civil Society dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan).

Telah mengizinkan dan melakukan *interview* dengan pimpinan dan mengambil sebagian data dokumen arsip yang bersangkutan dengan judul penelitian skripsi di LEMPAR. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan. Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yang Menyatakan,

Tuwaedaniva Tuwaemaengae

Direktur Umum

Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan

Curriculum Vitae



Penulis bernama lengkap **Mr. Muhammad Awae** lahir di Desa Natkudum, Pulopuyo, Nong Cik, Provinsi Pattani, Patani Thailand bagian selatan pada 5 November 1993. Penulis adalah salah seorang penggagas organisasi Perhimpunan Mahasiswa Internasional Sunan Kalijaga (PERMINSUKA) yang dideklarasikan pada 15 Februari 2019. Pendidikan yang diperoleh antara lain TK Ban Namdam 2 tahun (1998-1999); SD Ban Namdam 6 tahun (1999-2005) disamping itu memperoleh pendidikan dari Sekolah Melayu (TADIKA); SMP dan SMA Seangprathip Wittaya School 6 tahun (2005-2011); Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014-2019).

Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi pada tahun 2013 melalui jalur reguler. Penulis diwajibkan mengikuti kursus bahasa Indonesia di Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga selama satu tahun. Penulis diamanahkan menjadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Yogyakarta periode 2016-2017 dan aktif menjadi kader organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII-Rayon Humaniora Park) tahun 2015-2019. Aktivasnya sebagai penulis dan penerjemah berita tentang masalah konflik dan perdamaian di Patani.

Kontak hubungi:

Email; muhammadptn2014@gmail.com

Facebook; Faton

Twitter; Faton

Instagram; am.faton

WhatsApp; 0895-3401-4977-5